

The Problems of Islamic Boarding School Education in Indonesia

Problematika Pendidikan Pesantren di Indonesia

Nurul Fauziah

email: ruldzakiyah07sept@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Amin Dompus

Abstract: Pesantren is the oldest place for broadcasting religion and education in Indonesia. Pesantren is a traditional Islamic educational institution in Indonesia that plays an important role in preserving and developing Islamic science. Also, Islamic boarding schools play a role in shaping the character of Indonesian Muslims. During the New Order, pesantren competed with schools recognized by the government. Also, the pattern of modern human life affects the existence of pesantren as traditional Islamic educational institutions. To maintain its existence, pesantren made several changes deemed necessary, but still preserved tradition. Identification of existing problems is the first step in efforts to continuously improve the quality and quality of these educational institutions. The problems in this research are what problems are faced by pesantren in the era of globalization in Indonesia. In collecting the data, several methods were used, namely: observation and documentation. The results in this study indicate that there are several problems faced by pesantren in Indonesia, namely: Low equal distribution of learning opportunities, low academic quality, traditional teaching methods, and not many variations, changing curriculum policies, and inadequate educational facilities.

Keywords: Problems, Education, Islamic Boarding School, Indonesia

Abstrak: Pesantren merupakan tempat penyiaran Agama dan pendidikan tertua di Indonesia. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia memainkan peranan penting dalam melestarikan dan mengembangkan ilmu keislaman. Selain itu, pesantren berperan dalam membentuk karakter Muslim Indonesia. Selama Orde Baru, pesantren berkompetisi dengan sekolah yang diakui pemerintah. Selain itu, pola kehidupan manusia modern juga mempengaruhi keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional. Untuk mempertahankan keberadaannya, pesantren membuat sejumlah perubahan yang dianggap perlu, namun tetap melestarikan tradisi. Identifikasi terhadap problematika yang ada merupakan langkah awal dalam upaya perbaikan secara terus-menerus terhadap mutu dan kualitas lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Problem apa saja yang dihadapi pesantren di era globalisasi di Indonesia. Dalam mengumpulkan data tersebut digunakan beberapa metode yakni: observasi dan dokumentasi. Hasil dalam Penelitian ini menunjukkan adanya beberapa problematika yang dihadapi oleh pesantren di Indonesia yaitu: Rendahnya pemerataan kesempatan belajar, Rendahnya mutu akademik, metode pengajaran yang masih bersifat tradisional dan belum banyak variasi, kebijakan kurikulum yang berubah-ubah, dan fasilitas pendidikan yang belum memadai

Kata Kunci: Problematika, Pendidikan, Pesantren, Indonesia

A. Pendahuluan

Pesantren merupakan bagian dari pendidikan nasional yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan dan bahkan merupakan lembaga pendidikan yang memiliki kekhasan, keaslian (*indigenous*), dan keindonesiaan. Oleh karenanya pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang memberikan banyak kontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan Islam Nusantara dan sekaligus pemantik pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya di Indonesia.

Pertumbuhan dan perkembangan pesantren tersebut merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional yang terus bersinggungan, berdialog, dan berintegrasi dengan perubahan, budaya dan pengalaman sosiologi masyarakat di sekitar lingkungannya. Akar kultural inilah yang menjadi potensidasar yang telah menjadikan pesantren dapat bertahan, dan sangat diharapkan masyarakat dan pemerintah hingga saat ini.

Keberadaan pesantren hingga saat ini memang tidak dapat lepas dari pengalaman dan perjalanan sejarah yang panjang. Bahkan tidak jarang pesantren mengalami *diskriminasi* atau *peminggiran* kebijakan yang sangat merugikan. Pada masa pertengahan Orde Baru, pemerintah memberikan kebijakan melalui PP nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah yang memasukkan lembaga pendidikan pesantren bukan lembaga pendidikan formal yang setaradengan lembaga pendidikan formal yang ada. Pesantren hanya diakui sebagai lembaga pendidikan non formal yang masuk pada kategori jenis pendidikan luarsekolah yang terdiri atas pendidikan umum, keagamaan, pendidikan jabatan, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan. Hal ini disebabkan karena pemerintah menganggap proses pendidikan di pesantren belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, didominasi oleh muatan agama, menggunakan

kurikulum yang belum standar, memiliki struktur yang tidak seragam, tidak memiliki sistem jaminan mutu (*Quality Assurance*) dan menggunakan manajemen yang tidak dapat di kontrol oleh pemerintah. Dampak dari kebijakan ini adalah *terpinggirkannya* lembaga pendidikan pesantren dari sistem pendidikan nasional. Lebih-lebih ketika pesantren berhadapan dengan lembaga pendidikan modern yang lebih teratur.

Dampak lanjutannya adalah kurangnya pembinaan, upaya, perhatian, pendanaan, dan dukungan sistem (*supporting system*) yang dapat mendorong percepatan pesantren menjadi lembaga pendidikan yang memiliki sistem, standar, manajemen dan kurikulum yang baik.

Fakta telah membuktikan bahwa perhatian dan pengakuan (*recognition*) pemerintah terhadap institusi pesantren khususnya yang tidak menyelenggarakan pendidikan Madrasah/Sekolah formal masih sangat minim, bahkan tamatan Pesantren belum mendapat pengakuan *mu'adalah* atau kesetaraan, sehingga sering menemui kesulitan untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk melamar pekerjaan pada sektor formal. Padahal diakui atau tidak elamaini, masyarakat telah memberikan pengakuan terhadap kualitas lulusan Pesantren. Banyak dari Ilmuwan, negarawan, politisi dan tokoh masyarakat adalah lulusan pendidikan pesantren. Sebagian dari lembaga pendidikan diluar negeri pun telah memberikan pengakuan kesetaraan (*mu'adalah*) terhadap pendidikan pondok pesantren.

Akhirnya berkat perjuangan para ulama dan tokoh-tokoh muslim, terutamayang duduk di jajaran birokrasi, pesantren mulai mendapat pengakuan dari pemerintah dengan adanya kebijakan *mu'adalah*. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: E. IV/PP.032/KEP/80/98 tanggal 9 Desember 1998 yang berisi pernyataan pengakuan kesetaraan

kepadalulusan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Kemudian disusul dengan pengakuan kesetaraan kepada pesantren tersebut dari Menteri Pendidikan Nasional dengan terbitnya SK nomor 106/0/2000 tanggal 29 Juni 2000. (Nur Hadi Ihsan, 2006:106).

Dua tahun berikutnya Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: Dj.II/PPOL.I/AZ/9/02 tanggal 26 Nopember 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah. Setelah terbit Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akhirnya pesantren secara resmi berhasil masuk menjadi sub sistem pendidikan nasional. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, maka pendidikan di pondok pesantren sudah mendapatkan pengakuan yang jelas, dan memperoleh fasilitas yang sama seperti institusi-institusi pendidikan lainnya manakala mengikuti regulasi-regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. (Ara Hidayat. Eko Wahib, 2014). Saat ini pesantren telah banyak mengalami kemajuan dan peningkatan, baik dari segi bangunan, kualitas, dan lainnya.

B. Metode Penelitian

Metode pada penulisan ini menggunakan kajian literatur, yaitu dengan mengumpulkan data dari buku-buku, artikel, jurnal dan berita yang berkaitan dengan yang diteliti. Analisis data yang digunakan adalah analisis deduktif maupun induktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sistem Pendidikan di Pesantren

Sistem pondok pesantren selalu diselenggarakan dalam bentuk asrama atau

komplek asrama dimana santri mendapatkan pendidikan dalam suatu situasi lingkungan sosial keagamaan yang kuat dalam ilmu pengetahuan yang dilengkapi pula dengan atau tanpa ilmu pengetahuan umum. Dalam perkembangan selanjutnya, pondok pesantren disamping memberikan pelajaran ilmu agama, juga ilmu pengetahuan umum dengan system madrasah atau sekolah. Dari sudut administrasi pendidikan pondok pesantren dapat dibedakan dalam empat kategori berikut ini:

1. Pondok pesantren dengan system pendidikan yang lama pada umumnya terdapat jauh di luar kota, hanya memberikan pengajaran.
2. Pondok pesantren modern dengan sistem pendidikan klasikal berdasarkan atas kurikulum yang tersusun baik, termasuk pendidikan skill.
3. Pondok pesantren dengan kombinasi disamping memberikan pelajaran dengan system pengajaran, juga dengan sistem madrasah yang dilengkapi dengan pengetahuan umum.
4. Pondok pesantren yang tidak lebih baik dari asrama pelajar daripada pondok yang semestinya. (Muzayyin Arifin, 2003:232)

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan zaman, terutama adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan bentuk pesantren bukan berarti pesantren kehilangan ciri khasnya. Sistem pesantren adalah sarana yang berupa perangkat organisasi yang diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam pesantren.

Pesantren pada masa lalu, pada awal tahun 2001 pemerintah menyadari bahwa potensi pesantren perlu dioptimalkan yaitu untuk menyantuni kebutuhan pendidikan bagi generasi muda pedesaan dan pinggiran kota. Jumlah lembaga pendidikan pesantren di seluruh Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Dengan perkembangan

pesantren yang cepat tersebut ditunjang oleh keluarnya Undang-Undang Sistem Pendidikan No. 2 Tahun 1989 yang memberikan legalitas yang sama dengan sekolah-sekolah negeri tingkat dasar dan menengah terhadap madrasah-madrasah tingkat dasar dan menengah yang dikembangkan di Pesantren.(Zamakhsyari Dofier, 2009:67). Jumlah lembaga pesantren terus bertambah yang disebabkan karena lembaga pendidikan inilah yang dengan cepat dapat memberikan santunan pendidikan bagi generasi muda pedesaan yang memerlukan pendidikan tingkat menengah dan tinggi.

Pesantren pada masa sekarang, dalam penyelenggaraan sistem pendidikan dan pengajaran di Pesantren, dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk yaitu:

1. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam, yang pada umumnya diberikan dengan cara nonklasikal dan para santri biasanya tinggal dalam asrama dalam pesantren tersebut.
2. Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam, yang para santrinya tidak disediakan pondokan di komplek pesantren, namun tinggal tersebar di sekitar penjuru desa sekeliling pesantren tersebut. Dimana cara dan metode pendidikan dan pengajaran agama Islam diberikan dengan sistem weton, yaitu para santri datang berduyun-duyun pada waktu tertentu.
3. Pondok pesantren dewasa ini merupakan lembaga gabungan antara sistem pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan sistem bandungan, sorogan, ataupun wetonan, yang bagi para santrinya disediakan pondokan yang biasa disebut dengan Pesantren Modern yang memenuhi kriteria pendidikan nonformal serta penyelenggaraan pendidikan formal baik madrasah maupun sekolah umum dalam berbagai tingkatan.(Hasbullah, 1996: 45)

2. Problematika Pendidikan Pesantren di Indonesia

Umat beragama dan lembaga keagamaan di Indonesia merupakan potensi besar dan modal dasar dalam pembangunan mental spiritual bangsa serta merupakan potensi nasional untuk pembangunan fisik materil bangsa Indonesia. Pendidikan agama tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keberhasilan pembangunan nasional harus ditunjang dengan pendidikan dan pengajaran agama. Dengan pendidikan dan pengajaran agama, warga negara akan memperoleh pendidikan moral dan budi pekerti yang akan membentuk bangsa Indonesia menjadi warga negara yang bermoral, bertanggung jawab, dan tahu nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Dengan modal jiwa yang bersih, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, pembangunan nasional Indonesia dapat berjalan sukses dan lancar. Akan tetapi, pendidikan agama tidak boleh bertentangan dengan pembangunan nasional. Semua bentuk pendidikan di Indonesia harus berdasarkan pada filsafat bangsa, Pancasila. Sistem ini dikenal dengan sistem pendidikan nasional Indonesia. Semua tujuan pendidikan di Indonesia tidak boleh menyimpang dari ketentuan dan tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam ketentuan umum dijelaskan sebagai berikut:

Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global

sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. (Republik Indonesia, 2005: 102).

Sedangkan untuk kemudahan layanan pendidikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga merincikannya yang termaktub dalam Pasal II Ayat (1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Atas dasar inilah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin berlangsungnya pelaksanaan pendidikan, dengan tidak membedakan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Hal ini diperjelas lagi dalam Ayat (2) pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Pesantren telah memberikan tanggapan positif terhadap pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Dengan didirikannya sekolah-sekolah umum maupun madrasah-madrasah di lingkungan pesantren membuat pesantren kaya diverifikasi lembaga pendidikan dan peningkatan institusional pondok pesantren dalam kerangka pendidikan nasional. Pemerintah memberikan wewenang penuh kepada Departemen Agama (Kementerian Agama) Republik Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan di Madrasah dan Pondok Pesantren, baik dalam hal pembiayaan, pengadaan dan pengembangan sumberdaya manusia. Pengembangan kelembagaan dan sarana, serta peningkatan mutu lembaga pendidikan agama tersebut.

Pemerintah memiliki perhatian melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 yang

diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan eksistensi pesantren dalam pasal 26, sebagai berikut:

(1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat. (2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi. (3) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan.

a. Masalah Pokok Pendidikan di Indonesia

Pembangunan pendidikan yang sudah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka telah memberikan hasil yang cukup mengagumkan sehingga secara umum kualitas sumberdaya manusia Indonesia jauh lebih baik. Namun dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, kita masih ketinggalan jauh, oleh karena itu, upaya yang lebih aktif perlu ditingkatkan agar bangsa kita tidak menjadi tamu terasing di Negeri sendiri terutama karena terjajah oleh budaya asing dan terpaksa menari diatas irama gendang irang lain. Upaya untuk membangun sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berwawasan iptek, serta bermoral dan berbudaya bukanlah

suatu pekerjaan yang relatif ringan. Hal ini di sebabkan dunia pendidikan kita masih menghadapi berbagai masalah internal yang cukup mendasar dan bersifat kompleks. Kita masih menghadapi sejumlah masalah yang sifatnya berantai sejak jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Rendahnya kualitas pada jenjang sekolah dasar sangat penting untuk segera diatasi karena sangat berpengaruh terhadap pendidikan selanjutnya, ada beberapa masalah internal pendidikan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya pemerataan kesempatan belajar (*equity*) disertai banyaknya peserta didik yang putus sekolah, serta banyaknya lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini identik dengan ciri-ciri kemiskinan.
2. Rendahnya mutu akademik terutama penguasaan ilmu pengetahuan alam (IPA), matematika, serta bahasa terutama bahasa Inggris padahal penguasaan materi tersebut merupakan kunci dalam menguasai dan mengembangkan iptek.
3. Rendahnya efisiensi internal karena lamanya masa studi melampaui waktu standart yang sudah ditentukan.
4. Rendahnya efisiensi eksternal sistem pendidikan yang disebut dengan relevansi pendidikan, yang menyebabkan terjadinya pengangguran tenaga terdidik yang cenderung terus meningkat. Secara empiris kecenderungan meningkatnya pengangguran tenaga terdidik disebabkan oleh perkembangan dunia usaha yang masih di dominasi oleh pengusaha besar yang jumlahnya terbatas dan sangat mengutamakan efisiensi (padat modal dan padat teknologi). Dengan demikian penambahan kebutuhan akan tenaga kerja jauh lebih kecil dibandingkan penambahan jumlah lulusan lembaga pendidikan.
5. Terjadi kecenderungan menurunnya akhlak dan moral yang menyebabkan lunturnya tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial, seperti terjadinya

tawuran pelajar dan kenakalan remaja. Dalam hal ini pendidikan agama menjadi sangat penting menjadi landasan akhlak dan moral serta budi pekerti yang luhur perlu diberikan kepada peserta didik sejak dini. Dengan demikian, hal itu akan menjadi landasan yang kuat bagi kekokohan moral dan etika setelah terjun ke masyarakat. Masalah-masalah di atas erat kaitannya dengan kendala seperti keadaan geografis, demografis, serta sosio-ekonomi besarnya jumlah penduduk yang tersebar diseluruh wilayah geografis Indonesia cukup luas. Kemiskinan juga merupakan salah satu kendala yang memiliki hubungan erat dengan masalah pendidikan. Rendahnya mutu kinerja sistem pendidikan tidak hanya disebabkan oleh adanya kelemahan manajemen pendidikan tingkat mikro lembaga pendidikan, tetapi karena juga manajemen pendidikan pada tingkat makro seperti rendahnya efisiensi dan efektivitas pengolahan sistem pendidikan. Sistem dan tata kehidupan masyarakat tidak kondusif yang turut menentukan rendahnya mutu sistem pendidikan disekolah yang ada gilirannya menyebabkan rendahnya mutu peserta didik dan lulusannya. Kebijakan dan program yang ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, harus di rumuskan secara spesifik karena fenomena dan penyebab timbulnya masalah juga berbeda-beda di seluruh wilayah Indonesia. (Eti Rochaety, 2006: 64).

Sistem pendidikan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat sebagai supra sistem. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai supra sistem tersebut, dimana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan intern sistem pendidikan itu

menjadi sangat kompleks. Artinya suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat disekitarnya, dari mana murid-murid sekolah tersebut berasal, serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya diluar sistem persekolahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka penanggulangan masalah pendidikan juga sangat kompleks, menyangkut banyak komponen dan melibatkan banyak pihak. Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini, yaitu:

1. Bagaimana semua warga Negara dapat menikmati kesempatan pendidikan.
2. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun kedalam kancah kehidupan bermasyarakat.

Yang pertama mengenai masalah pemerataan, dan yang kedua adalah masalah mutu, relevansi, dan juga efisiensi pendidikan. (Umar Tirtaraharja & La Sulo, 2005: 226)

b. Tantangan Pesantren

Dengan segala bentuk dan aneka model pembelajaran keagamaan yang masih dapat dirunut keberadaannya, pondok pesantren di masa depan jelas mampu memberi nuansa dan pencerahan baru bagi dunia pendidikan terutama di Indonesia. Tentu saja jika dibarengi dengan kesungguhan pada pengembangan ilmu-ilmu modern dengan metodologi yang lebih komprehensif. Sehingga khazanah intelektual pesantren yang begitu kaya dengan berbagai disiplin ilmu agama dapat bersinergi dengan ilmu modern yang akhirnya mampu melahirkan paradigma pembelajaran yang integratif dan tidak dikotomis. Hal demikian dapat dilaksanakan antara lain dengan memperkenalkan

beberapa aspek pengetahuan modern yang aplikatif (applied sciences) dan mengkomparasikannya dengan berbagai disiplin ilmu islam yang menjadi keahlian pesantren.

Integrasi semacam ini tidak semata-mata menguntungkan dunia santri. Tetapi juga akan berdampak pada pengembangan masyarakat yang lebih dinamis karena integrasi pengetahuan yang terjadi. Sehingga keseimbangan pemikiran islam yang bersifat samawi dan pengayaan ilmu pengetahuan modern yang lebih humanis dapat tersinergi dengan optimal. Terlebih di zaman yang semakin kompleks ini, di mana sisi-sisi religiusitas manusia yang dulu digerus oleh pengetahuan yang dibiarkan bebas nilai (free value), tampak mulai kembali menampakkan diri. Yang jika tidak disikapi secara arif oleh dunia pendidikan islam macam pondok pesantren, maka kembalinya manusia pada spirit agama akan berdampak negatif, semisal radikalisme dan fundamentalisme. Karena itulah perencanaan ke depan bagi pengembangan kelembagaan pesantren di dunia pendidikan menjadi perlu untuk diperhatikan semua pihak. Apalagi dalam kerangka membangun masyarakat madani (civil society) yang mumpuni dan bertanggung jawab dalam tugas-tugas kemasyarakatan bagi masa depan bangsa.

Membangun budaya pendidikan integratif pada sebuah lembaga pendidikan semacam pondok pesantren jelas tidak mudah. Banyak aspek dan sisi yang harus dikuasai dengan baik, terutama yang terkait dengan pola pengembangan kemasyarakatan sebagai bentuk aplikasi ilmu dan nilai pembelajaran pondok pesantren. Meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan di satu sisi diiringi dengan peningkatan apresiasi pada problem sosial di masyarakat jelas membutuhkan keseriusan dan ketekunan tersendiri. Apalagi jika dilihat dari aspek kompleksitas masalah pada masyarakat modern saat ini. Dan jangan lupa membangun sebuah pola pendidikan pesantren semacam ini merupakan sebuah human capital yang

berdimensi jangka panjang, tidak dapat dinikmati hasilnya dalam waktu dekat. Bak menanam buah kelapa, berinvestasi pada pengembangan pendidikan akan membutuhkan kesabaran dan keteguhan hati. Karena pada dasarnya para santri memang tidak dididik untuk menjadi para sales ataupun marketer yang mampu mendatangkan keuntungan (profit) dalam waktu yang singkat bagi institusi pendidikan yang mengampunya. Bukan pula menjadi robot berteknologi tinggi yang mampu mengerjakan sekian banyak tugas dalam waktu relatif singkat. Karena bagaimana pun sumber daya manusia pada pendidikan pesantren adalah manusia biasa juga, sehingga dibutuhkan ruang yang cukup lama antara pencapaian intelektual santri yang dididik dan implementasi ilmu di dalam masyarakat secara komprehensif. Jika hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka peran aktif dari para santri demi pembangunan pendidikan islam di masa depan akan mudah diimplementasikan dengan hasil yang lebih baik.

Pendidikan pesantren masa depan haruslah tetap melestarikan konsep-konsep pendidikan kekhasan tradisional yang dimilikinya yang masih relevan dengan kondisi kekinian dan mencirikan kondisi khas pesantren, seperti kajian kitab kuning dengan berbagai metode pengajarannya, namun dengan tidak menutup mata terhadap perubahan-perubahan yang merupakan sebuah keniscayaan yang dapat memberikan muatan-muatan positif yang tidak mencederai nilai-nilai luhur pesantren yang telah terjaga sekian lama.

Pesantren, kini tidak lagi berkuat pada kurikulum yang berbasis keagamaan (*religion based curriculum*) semata dan cenderung melangit, tetapi sudah mulai menerapkan kurikulum yang menyentuh persoalan kekinian masyarakat (*society based curriculum*) (Haedari Amin & Ishom El-Saha, 2004:5)

Namun, demikian, penulis berkesimpulan lembaga pendidikan pesantren prospeknya masih sangat

menjanjikan, dan tetap akan berkembang sepanjang waktu dengan dinamika dan prosesnya yang berbeda.

c. Solusi Pemecahan Problematika Pendidikan Pesantren di Indonesia

1. Solusi Masalah Pemerataan Pendidikan

Banyak macam pemecahan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, langkah-langkah ditempuh melalui cara konvensional dan cara inovatif.

Cara konvensional antara lain:

- Membangun gedung sekolah seperti SD inpres dan atau ruangan belajar.
- Menggunakan gedung sekolah untuk double shift (sistem bergantian pagi dan sore).

Sehubungan dengan itu yang perlu digalakkan, utamanya untuk pendidikan dasar ialah membangkitkan kemauan belajar bagi masyarakat yang kurang mampu agar mau menyekolahkan anaknya.

Cara Inovatif antara lain:

Sistem pamong (pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru) atau in-pact sistem, sistem tersebut dirintis di solo dan didiseminasikan ke beberapa provinsi.

- SD/ MI kecil pada daerah terpencil
- Sistem guru kunjung
- SMP/ MTS terbuka
- Kejar Paket A dan b
- Belajar jarak jauh, seperti di universitas terbuka. (Umar Tirtarahardja dan La Sulo, 2005: 231)

2. Solusi Masalah Mutu, Efisiensi dan Relevansi Pendidikan

Meskipun untuk tiap-tiap jenis dan jenjang pendidikan masing-masing memiliki kekhususan, namun pada dasarnya pemecahan masalah mutu pendidikan bersasaran pada perbaikan kualitas komponen pendidikan serta mobilitas komponen-komponen tersebut. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan

dan pengalaman belajar peserta didik, dan menghasilkan hasil pendidikan.

Upaya pemecahan masalah masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat sebagai fisik dan lunak, personalia, dan manajemen. Sebagai berikut:

- a) Seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan PT.
- b) Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut.
- c) Penyempurnaan kurikulum
- d) Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tenteram untuk belajar
- e) Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran
- f) Peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran
- g) Kegiatan pengendalian mutu. (Umar Tirtarahardja dan La Sulo, 2005: 233)

D. Kesimpulan

Pesantren sebagai sebuah sistem pendidikan merupakan suatu pernyataan yang memang semestinya diungkapkan. Bahwa dalam peradaban Indonesia, pondok pesantren secara berlanjut terus menerus dan mengalami perkembangan yang pesat. Ini terbukti dengan adanya pondok pesantren dari dulu hingga sekarang, yang tentunya mempunyai peranan yang penting.

Dalam pendidikan, pesantren masuk dalam sistem pendidikan yang perlu diperhitungkan khususnya dalam mempelajari ilmu agama, dan juga tidak ketinggalan dalam pengetahuan umumnya. Selain itu, berbagai kegiatan non formal pun di dalam pondok pesantren dapat diikuti para santri untuk mengasah bakat mereka. Disisi lain, pondok pesantren juga mulai menampakkan keberadaannya sebagai lembaga pendidikan Islam yang mumpuni, dimana didalamnya didirikan sekolah baik formal maupun non formal.

Pesantren sebagai sebuah sistem pendidikan merupakan suatu pernyataan yang memang semestinya diungkapkan.

Bahwa dalam peradaban Indonesia, pesantren secara berlanjut terus menerus dan mengalami perkembangan yang pesat. Ini terbukti dengan adanya pesantren dari dulu hingga sekarang, yang tentunya mempunyai peranan yang penting.

Pesantren yang dikenal sekarang berasal dari Jawa, walaupun pada abad ke-7 M. telah diketahui terdapat komunitas muslim di Indonesia (Peureulak), namun lembaga pendidikan pada masa itu dikenal nama *meunasah*. Pesantren diartikan sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, kiyai sebagai figur sentralnya.

Perkembangan pesantren dari masa ke masa tetap mengalami perkembangan yang signifikan, walaupun pada masa penjajahan Belanda, lembaga pendidikan Islam mengalami penurunan kuantitas karena tindakan diskriminatif penjajah Belanda. Namun, pesantren tetap eksis karena kemampuan pengelola pesantren menyalahi segala kebijakan penguasa dari masa ke masa. Pada tahun 2001, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia membentuk Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren setelah menyadari perkembangan pesantren yang pesat.

Pemerintah telah memberikan porsi yang sama antara lembaga pendidikan umum dengan lembaga pendidikan agama Islam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pesantren pada masa sekarang diharapkan menjadi agen perubahan sebagai lembaga perantara yang diharapkan dapat berperan sebagai dinamisator dan katalisator pemberdayaan sumber daya manusia, penggerak pembangunan di segala bidang, serta pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyongsong era global.

Daftar Rujukan

- Aziz, Abdul. 1994. *Ensiklopedi Islam IV* Cet. II; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Departemen Pendidikan dan kebudayaan nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Haedari, Amin dan Ishom El-Saha. 2004. *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyyah* Jakarta: Diva pustaka
- Mas'ud, Abdurrahman. 2006. *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren* Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nata, Abudin. 2010. *Ilmu pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana
- Tafsir, Ahmad. 1992. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Shihab, Alwi. 2002. *Islam Inklusif* Cet. I; Bandung: Mizan
- Ara Hidayat, Eko Wahib., "Kebijakan Pesantren Mu'adalah dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas Pacitan," *DIALOG: Jurnal Pendidikan Islam*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung., No. 1, Th. IV, Juni 2014/1435.
- Syukur, Fatah. 2002. *Dinamika Pesantren dan Madrasah* Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Asrohah, Hanun. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam* Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Hasbullah. 1996. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Press
- Mochtar Buchori. 1994. *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta
- Ziemek, Manfred. 1986. *Pesantren dalam Perubahan Sosial* Cet. I; Jakarta: P3M
- Saridjo, Marwan. 2010. *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan terhadap Pendidikan Islam di Indonesia* Cet. I; Jakarta: Yayasan Ngali Aksara
- Arifin, Muzayyin. 1995. *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum* Cet. III; Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 2003. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Ihsan, Nur Hadi. 2006. *Profil Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur* Ponorogo: Pondok Modern arussalam Gontor
- Republik Indonesia. 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* Cet. I; Jakarta: Cemerlang
- Nasir, Ridwan. 2005. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Islam Pondok Pesantren di tengah arus perubahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Amir, Saifuddin. 2006. *Pesantren, Sejarah dan Perkembangannya* Cet. I; Bandung: Pustaka Pelajar
- Zaini, Wahid. 1994. *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, Yogyakarta: LKPSM NU DIY
- Yasmadi. 2002. *Modernisasi Pesantren* Jakarta: Ciputat Press
- Dhofier, Zamakhsyari dan Nurcholish Madjid. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* Cet. I; Jakarta: Paramadina
- Dhofier, Zamakhsyari. 2009. *Tradisi Pesantren Menadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa* Yogyakarta
- Eti Rochaety, dkk. 2006. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Umar Tirtarahardja dan La Sulo. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- _____. 1994. *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES
- _____. 1997. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Kyai* Cet. VII; Jakarta: LP3ES